

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

1.1 Simpulan

Hubungan buruk antara Pemerintah dengan umat Islam memunculkan sikap curiga pemerintah terhadap umat Islam sehingga mendorong terjadinya konflik, antara lain berupa kasus-kasus pelarangan jilbab sebagaimana yang diangkat dalam penelitian ini. Munculnya semangat berjilbab di sekolah-sekolah negeri dipengaruhi oleh pemahaman yang cukup mendalam mengenai keislaman. Pemahaman-pemahaman tersebut mereka dapatkan dari kegiatan-kegiatan *training* yang diadakan oleh mahasiswa dan organisasi Islam. Pemahaman agama tidak hanya didapatkan dari dalam negeri saja tetapi mereka juga mendapatkan pemahaman agama dari luar seperti pemikiran Al-Ikhwan Al-Muslimin yang masuk ke Indonesia, antara lain lewat buku-buku terjemahan dan adanya peran Gerakan Tarbiyah terhadap perjuangan pelajar-pelajar berjilbab di sekolah-sekolah negeri dan dampak dari Revolusi Iran yang masuk ke Indonesia.

Pemerintah menganggap bahwa pelajar yang memakai jilbab tidak seragam dengan siswa lainnya dan tidak disiplin dalam menjalankan peraturan sekolah. Selain itu, depdikbud menganggap bahwa jilbab bermuatan politik untuk menentang pemerintah dengan tidak mematuhi peraturan sekolah. Untuk menghentikan para pelajar berjilbab tersebut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan membuat peraturan resmi dengan mengeluarkan Surat Keputusan No.052/C/Kep/D.82 sebagai pedoman pemakain seragam sekolah. Akibatnya, para pelajar yang menggunakan jilbab mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan dari pihak sekolah seperti dikeluarkan dari kelas, tidak boleh ikut ujian dan rapotnya tidak dibagikan bahkan ada yang dikeluarkan dari sekolah. Hal itu membuat para pelajar dan mahasiswa melakukan gerakan-gerakan seperti aksi turun kejalan, berdialog dengan pemerintah dan mengirim surat kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk

memperjuangkan hak mereka dalam menggunakan jilbab. Selain itu, beberapa pelajar mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan haknya dalam berjilbab.

Namun akhirnya, perjuangan para pelajar dan Mahasiswa Islam membuahkan hasil pada tahun 1991. Pemerintah Orde Baru mengeluarkannya SK No. 100/C/Kep/D/1991 yang menandai diperbolehkannya para pelajar menggunakan jilbab. Persoalan jilbab atau busana muslim lebih tepat dilihat dari sudut pandang hak seseorang dalam menjalankan agamanya daripada dilihat dari sudut pandang politik. Jadi, selama hak tersebut tidak merugikan kepentingan lembaga (sekolah) ataupun kepentingan orang lain, maka hak tersebut tidak perlu dilarang.

Bagaimanapun juga, sikap Departemen P dan K terhadap persoalan jilbab ketika itu perlu dilihat menurut suasana zamannya yang memang belum begitu bersahabat terhadap berbagai aspirasi umat Islam. Selain itu, kemunculan jilbab di sekolah-sekolah negeri dengan bentuk dan pola semacam ini memang baru pertama kali terjadi pada saat itu, sehingga Departemen P dan K belum mempunyai contoh kasus ataupun pengalaman sejenis yang bisa digunakan secara ideal dalam pengambilan keputusan. Sementara pada saat yang sama, peraturan seragam sekolah dianggap sebagai suatu hal yang penting untuk menumbuhkan rasa persatuan pelajar. Adanya pengalaman ini diharapkan bisa menjadi pelajaran yang berharga untuk menghindari terjadinya peristiwa serupa di masa-masa yang akan datang.

1.2 Saran

Pertama, untuk Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI, tulisan ini dapat dijadikan sumber bacaan untuk menambah pengetahuan mengenai gerakan para pelajar terhadap larangan penggunaan jilbab. tulisan ini juga dapat memperkaya penulisan dan sumber bacaan mengenai terutama sejarah Islam di Indonesia pada zaman Orde Baru dan dapat mengambil nilai-nilai yang

terkandung dalam gerakan pelajar dan mahasiswa ini.

Kedua, untuk sekolah-sekolah dalam mata pelajaran sejarah kelas XII. Adapun siswa-siswa mampu menanamkan nilai-nilai sikap atau karakteristik terutama ialah cinta tanah air, nasionalisme, tanggung jawab, jujur, adil, saling menghargai, dan menghormati. Salah satu sikap cinta tanah air dan nasionalisme yang dapat ditanamkan kepada siswa yaitu mampu menyaring budaya-budaya yang berasal dari luar khususnya budaya yang berasal dari Barat tidak sesuai dengan nasional. Budaya yang berasal dari luar khususnya Barat akan mengikis budaya nasional sehingga siswa harus menanamkan rasa cinta tanah air dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, mampu menghargai kebudayaannya sendiri. selain budaya, mereka juga harus mencintai sejarah bangsa Indonesia maupun lokal.